Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 5 Nomor. 2 Juni 2025
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 194-205
DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5841
Available Online at: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa

Evaluasi Efektivitas Program Penanggulangan Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi dalam Meningkatkan Perlindungan Masyarakat

Sultan Setiawan [1], Ika Devy Pramudiana [2*], Sapto Pramono [3], Sri Roekminiati [4]
[1-4] Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
Email : ika.devy@unitomo.ac.id *

Abstract: *Fire is one of the serious threats that can disrupt the security, safety, and survival of the community, especially in areas with limited disaster management systems. Ngawi Regency as a developing area requires an effective fire management system to provide maximum protection to the community. This study aims to evaluate the effectiveness of the fire management program implemented by the Civil Service Police Unit and the Ngawi Regency Fire Department in improving community protection. This study uses a qualitative approach with a descriptive study type. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. All data obtained were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the program is not yet fully effective, characterized by planning that is less based on risk data, uneven implementation across regions, and low socialization and community participation. The conclusion of this study states that the success of the program is highly dependent on adaptive planning, equitable distribution of resources, and active community involvement. For further research, it is recommended to develop an integrated quantitative and qualitative indicator-based evaluation model, as well as a comparative study between regions to obtain a broader picture of best practices in fire management at the regional level.*

Keywords: *community protection, fire management, firefighters, policy evaluation, program effectiveness*

Abstrak: Kebakaran merupakan salah satu ancaman serius yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sistem penanggulangan bencana. Kabupaten Ngawi sebagai wilayah yang terus berkembang membutuhkan sistem penanggulangan kebakaran yang efektif agar mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan perencanaan yang kurang berbasis data risiko, pelaksanaan yang tidak merata di seluruh wilayah, serta sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada perencanaan yang adaptif, distribusi sumber daya yang merata, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan pengembangan model evaluasi berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif secara terpadu, serta kajian komparatif antar daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik terbaik dalam penanggulangan kebakaran di tingkat daerah.

Kata kunci: efektivitas program, evaluasi kebijakan, penanggulangan kebakaran, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perlindungan masyarakat terhadap risiko kebakaran semakin menempati posisi strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian material yang signifikan, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup

Received: April 18, 2025; Revised: April 30, 2025; Accepted: Mei 02, 2025; Online Available: Mei 07, 2025

masyarakat. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terjadi lebih dari 2.500 kasus kebakaran di Indonesia, yang mayoritas terjadi di kawasan permukiman padat serta wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana (BNPB, 2023). Fenomena ini mengindikasikan pentingnya sistem penanggulangan kebakaran yang responsif dan berdaya guna, dengan penekanan pada optimalisasi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan program penanggulangan kebakaran secara terintegrasi. Namun, efektivitas pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan utama yang muncul meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya kapasitas personel, rendahnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait sejauh mana efektivitas program yang telah dijalankan dalam memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, khususnya di daerah seperti Kabupaten Ngawi yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.

Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, teori evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2003) memberikan pendekatan komprehensif untuk menilai keberhasilan sebuah program berdasarkan enam dimensi utama, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi berbasis teori ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berorientasi pada output program, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana kebijakan publik mampu menghasilkan dampak substantif terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan Dunn menjadi relevan untuk digunakan dalam mengevaluasi program penanggulangan kebakaran, khususnya dalam mengukur kontribusi program terhadap perlindungan masyarakat dari risiko bencana.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menegaskan pentingnya evaluasi dalam mendukung perbaikan kebijakan publik. (Yuliana et al., 2024) menemukan bahwa efektivitas program kebencanaan sangat ditentukan oleh akurasi sasaran, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program. (Ariyani et al., 2016) menambahkan bahwa tanpa mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, banyak program pemerintah tidak memberikan dampak maksimal, terutama pada kelompok rentan. Sementara itu, dalam perspektif perlindungan masyarakat, (Fultanegara & ASNAWI, 2014) menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kapasitas lokal, sedangkan (Wahyuni & Manaf, 2016) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sebagai kunci

keberlanjutan program. Penelitian-penelitian ini menggarisbawahi perlunya evaluasi berbasis pendekatan teoritis yang sistematik dalam menilai efektivitas program kebijakan publik.

Studi lainnya oleh (Seftyarizki et al., 2019) menunjukkan bahwa sistem evakuasi kebakaran yang terencana dengan baik dapat mengurangi risiko korban jiwa secara signifikan, sementara (Mishra & Mazumdar, 2022) menekankan peran pendidikan kebencanaan dalam membangun kesiapsiagaan komunitas. Di Kabupaten Ngawi, (Sufardi et al., 2024) menemukan bahwa program penanggulangan kebakaran masih menghadapi tantangan struktural, seperti minimnya jumlah personel dan kendaraan pemadam. Sementara itu, (Cahyani et al., 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi yang belum merata menghambat efektivitas respons masyarakat terhadap bencana kebakaran. Temuan-temuan ini semakin menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat harus dikaji secara menyeluruh melalui evaluasi mendalam terhadap efektivitas program yang telah dijalankan oleh instansi terkait.

Dengan mengintegrasikan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan pendekatan perlindungan masyarakat, penelitian ini mengisi celah dalam literatur dengan mengkaji secara kritis efektivitas program penanggulangan kebakaran di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menawarkan kontribusi empiris dan teoretis untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan lokal dalam konteks penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dalam menghadapi risiko kebakaran.

2. KAJIAN TEORI

Efektivitas program merupakan konsep fundamental dalam evaluasi kebijakan publik yang mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Menurut (Mustafid, 2017), efektivitas mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Dalam praktik kebijakan publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari capaian administratif, tetapi juga dari ketepatan sasaran, efisiensi operasional, dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat penerima manfaat (Simatupang & Akib, 2011). Oleh karena itu, evaluasi efektivitas menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti, terutama untuk program-program layanan publik seperti penanggulangan kebakaran yang berdampak langsung pada aspek keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menambahkan dimensi teoritis yang lebih komprehensif, (Dunn, 2003)mengembangkan kerangka evaluasi kebijakan yang mencakup enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini menekankan bahwa evaluasi tidak boleh hanya fokus pada hasil langsung (output), tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan publik, mengurangi ketimpangan, dan menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal. Dalam konteks ini, teori Dunn memberikan fondasi analisis yang kuat untuk menilai program penanggulangan kebakaran secara lebih sistematis, terutama dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program berdasarkan indikator kebijakan yang holistik.

Program penanggulangan kebakaran sendiri merupakan bagian integral dari sistem perlindungan masyarakat yang bertujuan meminimalkan dampak kebakaran melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pasca-kejadian. (Erna et al., 2024) menegaskan bahwa efektivitas program semacam ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain kesiapan sumber daya manusia, kecukupan peralatan dan infrastruktur, kecepatan serta ketepatan respons, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam sistem penanggulangan. Di Indonesia, peran tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selain melakukan pemadaman kebakaran, juga bertugas menjalankan edukasi publik, inspeksi bangunan, serta koordinasi antarlembaga dalam upaya pencegahan.

Dalam kerangka perlindungan masyarakat, pendekatan human security (keamanan manusia) yang diusung oleh UNDP (1994) menekankan pentingnya jaminan terhadap keselamatan fisik dan psikologis warga dari ancaman seperti kebakaran. Perlindungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kelembagaan, misalnya melalui peningkatan literasi kebencanaan, partisipasi komunitas dalam sistem peringatan dini, dan penguatan kapasitas adaptif masyarakat. (Pattimahu, 2021) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa efektivitas perlindungan terhadap risiko kebakaran sangat bergantung pada sinergi antara kapasitas kelembagaan dan ketahanan sosial masyarakat yang saling mendukung.

Lebih lanjut, efektivitas program penanggulangan kebakaran juga harus dianalisis dalam kerangka manajemen risiko bencana. (Liu et al., 2018) menyarankan bahwa manajemen risiko yang baik memerlukan pemetaan risiko berbasis data historis, penguatan sistem kelembagaan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan. Dalam hal ini, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh keselarasan antara kebijakan, alokasi sumber daya, dan kualitas koordinasi antarinstansi.

Dengan mengintegrasikan teori efektivitas program, teori evaluasi kebijakan Dunn, pendekatan human security, dan manajemen risiko bencana, kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika program penanggulangan kebakaran. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk menelaah sejauh mana program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi telah memenuhi indikator keberhasilan program serta kontribusinya dalam memperkuat perlindungan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, sekaligus sumbangan praktis dalam merancang kebijakan penanggulangan kebakaran yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas program penanggulangan kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara utuh, serta memungkinkan peneliti memahami makna, pengalaman, dan dinamika dari perspektif aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Penelitian ini juga mendasarkan diri pada prinsip bahwa realitas sosial tidak dapat direduksi hanya pada angka, melainkan perlu diinterpretasikan secara mendalam dan kontekstual.

Kerangka evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn, yang menekankan pentingnya menilai suatu kebijakan berdasarkan dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai program penanggulangan kebakaran secara menyeluruh, baik dari sisi pelaksanaan teknis, capaian program, maupun relevansi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan model evaluasi ini, penelitian diarahkan untuk tidak hanya melihat output administratif, tetapi juga menilai bagaimana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta memberikan manfaat yang terdistribusi secara adil.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat struktural, petugas pelaksana, tokoh masyarakat, dan warga yang menjadi sasaran program. Teknik observasi juga digunakan untuk memperoleh data empiris di lapangan terkait kesiapan sarana dan prasarana, koordinasi antarunit, serta bentuk keterlibatan

masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Selain itu, dokumentasi dikumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti arsip internal instansi, laporan kegiatan, dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kategori tematik yang relevan dengan indikator evaluasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks untuk menunjukkan keterkaitan antarvariabel yang ditemukan. Kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan pola-pola yang muncul dari data lapangan, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi teknik dan sumber serta validasi temuan melalui konfirmasi langsung kepada informan. Langkah ini dimaksudkan agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang aplikatif dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi, yang dianalisis menggunakan pendekatan interaktif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun keterlibatan masyarakat sebagai komponen penting dalam sistem perlindungan kebakaran.

Dalam aspek perencanaan, diketahui bahwa program yang dijalankan masih bersifat rutin tahunan dan belum disusun berdasarkan data pemetaan risiko kebakaran secara menyeluruh. Penetapan kegiatan lebih didominasi oleh kebiasaan administratif, bukan berdasarkan analisis kebutuhan lapangan. Proses penyusunan program kurang melibatkan petugas teknis dan aktor lokal, sehingga tidak mencerminkan kondisi faktual wilayah-wilayah rawan kebakaran. Jika dilihat dari sudut pandang evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, aspek efektivitas dan ketepatan program belum terpenuhi karena output kebijakan belum mampu menjawab kebutuhan strategis secara langsung.

Dari hasil observasi diketahui bahwa terdapat ketimpangan signifikan dalam kesiapan operasional antarwilayah. Unit pemadam kebakaran di pusat kota cenderung memiliki personel, armada, dan sistem respons yang lebih baik dibandingkan dengan unit di wilayah pedesaan. Kondisi ini berdampak pada lamanya waktu respons di daerah terpencil dan memperbesar potensi kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Ketimpangan ini mencerminkan belum optimalnya dimensi pemerataan dan efisiensi dalam pelaksanaan program, yang menjadi indikator penting dalam evaluasi kebijakan.

Data dokumentasi mengungkap bahwa capaian kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran belum sesuai target. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya sekitar 60 persen kegiatan sosialisasi yang terealisasi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, minimnya tenaga penyuluh, dan belum adanya strategi yang sistematis dalam memberdayakan masyarakat sebagai mitra aktif. Dalam kerangka evaluasi kebijakan, hal ini menunjukkan rendahnya nilai responsivitas, karena kebijakan belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan informasi dan edukasi publik yang terus berkembang.

Hasil triangulasi data juga menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan kebakaran. Sebagian besar warga tidak mengetahui prosedur pelaporan, belum pernah mengikuti pelatihan kebakaran, serta tidak dilibatkan dalam perencanaan kegiatan di tingkat lokal. Situasi ini mengindikasikan bahwa orientasi kebijakan masih bersifat top-down dan kurang mempertimbangkan kecukupan serta keberterimaan kebijakan oleh masyarakat, yang merupakan bagian penting dalam evaluasi kebijakan menurut pendekatan partisipatif.

Secara keseluruhan, efektivitas program penanggulangan kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi belum optimal. Kelemahan terdapat pada perencanaan yang tidak berbasis risiko, pelaksanaan yang tidak merata antarwilayah, kegiatan sosialisasi yang belum maksimal, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Berdasarkan pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator seperti efektivitas, pemerataan, kecukupan, dan responsivitas belum tercapai secara memadai. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan berbasis data spasial dan risiko, peningkatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh, serta strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih terstruktur dalam mendukung perlindungan terhadap risiko kebakaran secara berkelanjutan.

Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada tujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat. Berdasarkan

hasil analisis data, ditemukan bahwa perencanaan program cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis data risiko kebakaran. Rendahnya partisipasi dari unsur pelaksana teknis maupun masyarakat memperlihatkan lemahnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan. Dalam konteks evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, aspek adequacy dan responsiveness dari kebijakan ini belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini sejalan dengan temuan (Andrew, 2018) yang menyatakan bahwa efektivitas program kebencanaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktor lokal dan keberadaan peta risiko yang dapat dijadikan dasar perencanaan strategis.

Ketimpangan distribusi sumber daya menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program. Ketersediaan personel dan armada pemadam yang tidak merata antarwilayah berdampak langsung pada efektivitas respons kebakaran, terutama di daerah pinggiran. Kondisi ini menurunkan tingkat efficiency dan equity dari implementasi kebijakan menurut Dunn. (Ratheesh Mon & Sekher, 2022) menegaskan bahwa keadilan spasial dalam pelayanan publik menjadi indikator penting dalam perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana, karena ketidakseimbangan akses dapat meningkatkan kerentanan.

Aspek edukasi dan sosialisasi kebakaran juga menunjukkan performa yang belum optimal. Selama tiga tahun terakhir, kegiatan penyuluhan kebakaran tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan. Minimnya literasi kebakaran dalam masyarakat mengindikasikan lemahnya strategi komunikasi risiko. Berdasarkan perspektif evaluasi kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa effectiveness dari program edukatif belum sesuai harapan. (Tam & Peh, 2025) menyebutkan bahwa keberhasilan komunikasi risiko sangat ditentukan oleh kontinuitas, konteks lokal, dan pendekatan dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan program turut memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan ini belum memenuhi prinsip appropriateness dan participation, dua indikator penting dalam teori Dunn. Warga sebagian besar belum dilibatkan dalam forum perencanaan, tidak memiliki akses terhadap pelatihan kebakaran, dan tidak mengetahui prosedur pelaporan kebakaran secara efektif. (Fernandes & Panjaitan, 2019) menegaskan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan penanggulangan kebakaran membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai subjek, bukan hanya objek perlindungan.

Dari sisi kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi kendala dalam optimalisasi program. Ketidakterpaduan antara dinas pemadam kebakaran dengan instansi lain seperti BPBD dan dinas perumahan menghambat integrasi program penanggulangan kebakaran dalam sistem penanggulangan bencana yang lebih luas. (Torfing, 2013) menyatakan

bahwa reformulasi kelembagaan berbasis kolaborasi multi-aktor penting untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik darurat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan top-down dalam implementasi program masih mendominasi, tanpa adanya mekanisme umpan balik yang sistematis dari masyarakat. Padahal menurut Dunn, feedback merupakan elemen penting dalam evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk penyesuaian dan perbaikan program secara berkelanjutan. Kekosongan mekanisme evaluatif berbasis masyarakat menyebabkan terhambatnya inovasi adaptif yang dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko kebakaran.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program penanggulangan kebakaran di Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya tercapai. Dengan mengacu pada dimensi evaluasi kebijakan Dunn, seperti effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness, dapat disimpulkan bahwa berbagai indikator tersebut belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi kebijakan diperlukan dengan menekankan perencanaan berbasis risiko, redistribusi sumber daya secara adil, dan pelibatan masyarakat dalam seluruh siklus program.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan literatur empiris mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan kebakaran di wilayah non-metropolitan, yang selama ini masih kurang tereksplorasi. Penelitian ini juga memberikan pijakan untuk pengembangan kebijakan publik berbasis data dan partisipasi komunitas di tingkat lokal. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model evaluasi berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif yang terintegrasi, serta perbandingan lintas daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam sistem perlindungan kebakaran yang adaptif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan kebakaran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi belum berjalan secara optimal dalam memenuhi tujuan perlindungan masyarakat. Dari sudut pandang evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, berbagai dimensi utama seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), kesetaraan (equity), responsivitas, dan kesesuaian (appropriateness) belum sepenuhnya tercapai dalam pelaksanaan program tersebut.

Perencanaan program masih didominasi oleh pendekatan administratif, tanpa didasarkan pada pemetaan risiko kebakaran yang komprehensif dan mutakhir. Minimnya partisipasi dari pelaksana teknis dan masyarakat dalam proses perencanaan juga mencerminkan

lemahnya pemenuhan dimensi responsivitas dan kesesuaian, di mana kebijakan belum sepenuhnya merespons kebutuhan nyata di lapangan.

Pada tahap implementasi, ditemukan ketimpangan distribusi sumber daya, seperti jumlah personel, kelayakan armada, serta lambatnya respons di wilayah pinggiran. Situasi ini memperlihatkan rendahnya tingkat efisiensi dan kesetaraan layanan publik, terutama bagi masyarakat di kawasan yang secara geografis lebih rentan terhadap risiko kebakaran.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat belum dijalankan secara maksimal. Rendahnya intensitas dan cakupan penyuluhan berdampak pada lemahnya kesadaran kolektif serta kesiapsiagaan masyarakat, sehingga dimensi efektivitas dari kebijakan tersebut belum tercapai secara optimal. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pelatihan dan simulasi juga memperkuat bahwa pendekatan berbasis komunitas belum menjadi strategi utama dalam kebijakan ini.

Secara umum, program ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal integrasi lintas sektor, alokasi sumber daya yang merata, serta partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depan, diperlukan penguatan perencanaan berbasis data risiko, peningkatan pemerataan fasilitas operasional, serta penerapan pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam sistem penanggulangan kebakaran. Evaluasi kebijakan berbasis teori Dunn dapat menjadi kerangka reflektif sekaligus strategis dalam menyempurnakan desain dan implementasi program secara berkelanjutan.

REFERENCE

Andrew, M. (2018). Revisiting community-based disaster risk management. In *Reducing Disaster Risks* (pp. 42–52). Routledge.

Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Beik, I. S. (2016). Evaluasi pogram pengentasan kemiskinan menggunakan metode rappoverty. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *6*(2), 181–197.

Cahyani, N., Zahran, W. S., & Irwansyah, I. (2021). Efektivitas Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Bangunan Rumah Dan Lahan Pada Masyarakat Di Permukiman Padat Penduduk (Studi Kasus Di Kecamatan Bekasi Utara, Periode Tahun 2021). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *2*(4), 390–397.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Erna, Y., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali. *Journal of Law \& Policy Review*, *2*(1), 139–146.

Fernandes, A. A. R., & Panjaitan, R. B. (2019). The effect of community and company participation and implementation of good forest fire governance on the forest fire policy in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, *10*(1), 102–115.

Fultanegara, A. A., & ASNAWI, A. (2014). *PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DAN TINGKAT REALISASI PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI PERKOTAAN (Studi Kasus: Program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Liu, W., Dugar, S., McCallum, I., Thapa, G., See, L., Khadka, P., & Shakya, P. (2018). Integrated participatory and collaborative risk mapping for enhancing disaster resilience. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, *7*(2), 68.

Mishra, S., & Mazumdar, S. (2022). Promoting community resilience through disaster education. *PLOS ONE*, *17*(12), e0276393.

Mustafid, H. (2017). Peningkatan kinerja aparatur sipil negara melalui budaya organisasi. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, *3*(01), 1–14.

Pattimahu, Z. (2021). *KAPASITAS DAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA KEBAKARAN (STUDI KASUS: PULAU BARRANG LOMPO, KOTA MAKASSAR)= COMMUNITY CAPACITY AND RESILIENCE IN FACING THE THREAT OF FIRE DISASTER (CASE STUDI: BARRANG LOMPO ISLAND, MAKASSAR CITY)*. Universitas Hasanuddin.

Ratheesh Mon, P., & Sekher, T. V. (2022). Spatial (in) Justice and Vulnerable Communities: A Study on the Landslide Susceptibility of Dalits in Idukki District, Kerala. *International Geographical Union Thematic Conference*, 407–419.

Seftyarizki, D., Ramawangsa, P. A., & Saputri, D. O. (2019). Evaluasi jalur evakuasi bencana kebakaran pada sirkulasi gedung serbaguna UNIB. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur \& Fasilitas*, *3*.

Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *2*(1).

Sufardi, I., Sunarto, S., & Abduh, M. (2024). Evaluasi Kinerja Personil dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran (Studi Kasus Posko Kemuning pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *2*(4), 72–88.

Tam, W. J., & Peh, R. (2025). 33. Successful risk communication and community engagement. In *Infectious Disease Emergencies: Preparedness and Response*.

Torfing, J. (2013). Collaborative innovation in the public sector. In *Handbook of innovation in public services* (pp. 301–316). Edward Elgar Publishing.

Wahyuni, Y. T., & Manaf, A. (2016). Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemi di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, *12*(4), 472–482.

Yuliana, E. H., Rohayatin, T., & Aprilia, B. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM BADAN

PENANGGULANGAN DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERANG. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, *1*(1).